

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Aotek Libra pada 23 September 2024-26 Oktober 2024 adalah:

1. Calon apoteker dapat melakukan standar pelayanan kefarmasian yang professional pada segala aspek kefarmasian sesuai dengan sgtandar pelayanan kefarmasian utamanya di apotek dalam bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi.
2. Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang professional sesuai dengan kode etik kefarmasian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Calon apoteker harus selalu melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill*, dan afektif untuk melakukan pekerjaan kefarmasian demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra pada 23 September 2024-26 Oktober 2024 adalah:

1. Calon apoteker harus aktif dalam memahami dan menggali informasi terkait tanggung jawab sebagai apoteker dalam kegiatan

kefarmasian di apotek, dapat secara aktif berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menambah wawasan.

2. Calon apoteker harus mempersiapkan diri dengan baik dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan, pelaksanaan *dispensing*, serta peracikan obat dengan baik
3. Calon apoteker harus membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan pasien maupun rekan sejawat saat memberikan pelayanan informasi obat (KIE), konseling, dan swamedikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. 2024. Dexyclav Forte Sirup 60ml. Diakses 26 Oktober 2024.
<https://www.alodokter.com/alosshop/products/dexyclav-forte-sirup-60-ml/65695a7510b237502c7953be>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang PEDoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Jakarta: Badan POM.
- Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 2018. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Precursor Farmasi di Fasilitas Kefarmasian. Jakarta: Balai POM.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1990. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 992/Menkes/PER/X/1993, tentang Ketentuan dan

- Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penggolongan psikotropika. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Katzung, B.G., Masters, S.B. dan Trevor, A.J. 2014. *Farmakologi Dasar & Klinik, Vol.2, Edisi 12, Editor Bahasa Indonesia* Ricky Soeharsono et al. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- McEvoy, G. K.Ed. 2011. *AHFS Drug Information Essentials*. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, Inc.
- MIMS Indonesia. 2024. Atorvastatin. Diakses 25 Oktober 2024. <https://www.mims.com/indonesia/drug/info/atorvastatin?mtype=generic>
- MIMS. 2024. Breathy. Diakses 26 Oktober 2024. <https://www.mims.com/indonesia/drug/info/breathy?type=brief&language=id>

Sweetman, S.C. 2011. *Martindale: The Complete Drug Reference* (37th ed.).
London: Pharmaceutical Press.